

REORIENTASI KEBIJAKAN MONETER *INFLATION TARGETING*

Oleh: Tineke Wolok

Abstract

The high inflation suggests the economic crisis in Indonesia recently. The government implements the inflation targeting in monetary policy to recovery the economic stability. Nevertheless, this policy can perform merely the precondition of inflation targeting had been fulfilled. And apparently, this policy can be difficult to realize, because the precondition was complicated and exactly became the obstacle.

Kata Kunci: *Reorientasi, Kebijakan Moneter, Inflasi, liberalisasi.*

Pendahuluan

Pada dasarnya pakar ekonomi menginterpretasikan krisis yang terjadi di Asia pada umumnya dan bangsa Indonesia sebagai akibat dari dua hal yang kontradiktif yakni: Pertama, adanya regulasi pemerintah yang tidak efektif. Kedua, terlampau sedikitnya aturan pemerintah di bidang tertentu yang dibarengi dengan regulasi dan ekonomi yang eksekutif di bidang lainnya. Hal ini menyebabkan lemahnya sektor keuangan, tingginya tingkat utang perusahaan, dan kurangnya transparansi.

Menurut David Hale sebagaimana dikutip oleh Sudarman (2001: 13), melihat adanya tiga

penyebab utama krisis. Antara lain: Pertama, berlakunya nilai tukar valuta asing yang berpatokan dolar Amerika, Kedua, adanya kontradiksi ekonomi makro atau masalah alokasi modal di dalam negeri negara-negara Asia Tenggara, dan Ketiga, terjadinya krisis ekonomi di Jepang sehingga negara-negara Asia mengalami kekurangan dana yang biasanya bersumber dari perdagangan luar negeri.

Secara bertahap kita menyaksikan kebijakan ekonomi yang bergerak dari preliberalisasi ekonomi ke era liberalisasi dan komitmen kepada *full liberalisasi* ekonomi. Berbagai rangsangan ditawarkan kepada penanam modal

asing dan domestik, untuk berbisnis dan sektor-sektor usaha mulai dibuka dengan sedikit sekali pembatasan. Malah cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan negara pun mulai dibuka, sehingga tafsir Pasal 33 UUD 1945 menjadi sangat berubah. PP No.20 tahun 1994 merupakan contoh yang sering dikutip, tetapi banyak paket deregulasi lain yang pada intinya membuka negara ini bagi masuknya modal asing termasuk dalam cabang-cabang yang sering dikategorikan sebagai penting, menyangkut hajat hidup orang banyak.

Konsekwensi dari keterbukaan ini adalah negara menjadi bagian dari klub negara-negara ekonomi terbuka yang dikuasai oleh negara-negara maju, atau bias juga menjadi hanya *enclave* dari negara-negara maju. Negara ini akan menjadi *koloni* baru yang diisap oleh modal dan teknologi asing. Tentu semua ini bergantung pada tingkat kesiapan dan ketahanan ekonomi bangsa ini. Pasar global akan menguji potensi-potensi ekonomi kita, dalam artian apakah potensi ekonomi itu bisa melebihi sumber-sumber daya alami dan keringat buruh yang dibayar murah.

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung

sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju *inflasi* yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya *investasi*, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Kemandekan pembangunan ekonomi dan ketidaksiapan Indonesia menghadapi krisis membuat ekonomi Indonesia ada pada posisi berbahaya jika pengelola ekonomi masih terus menjalankan kebijakannya selama ini. Apalagi jika kebijakan *fiskal* lebih banyak dimensi politiknya daripada mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi bangsa dan mengabaikan pertimbangan rasional dari sisi ekonomi.

Apalagi dalam kondisi keuangan negara yang masih berat, kondisi fiskal belum *sustainable*, pengelolaan fiskal yang tidak rasional akan memperburuk kondisi ekonomi. Kita terjebak kepentingan jangka pendek dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan sehingga kepentingan rakyat "dikorbankan".

Sementara itu, pembangunan berjalan di tempat, *infrastruktur* penting banyak yang rusak berat. Namun, otoritas tampaknya tidak melihat itu semua, atau tidak mau melihat itu semua.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini dengan mencoba memberikan deskripsi lebih mendalam terhadap problem yang melanda ekonomi di negara kita. Pemilihan topik yang dibahas ini tidak lain untuk dapat memberikan kontribusi sedikit terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Kiranya dengan kehadiran tulisan ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu ekonomi sendiri.

Konsep Negara Kesejahteraan

Berbicara tentang kesenjangan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan dan pembahasan tentang negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang muncul pada abad modern setelah dalam waktu berabad-abad tanggung jawab negara untuk melindungi dan melayani rakyatnya senantiasa dipertanyakan dan dikritisi oleh para ahli hukum dan politik.

Dalam realita negara atau pemerintahan modern, jaminan sosial bagi rakyat erat kaitannya dengan isu negara kesejahteraan (*welfare state*). Pengertian kontemporer tentang negara kesejahteraan bertalian dengan munculnya asuransi sosial (*social insurance*). Meskipun secara embrional, kebijakan pemerintah yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan ekonomi rakyat sudah muncul berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Baru dalam abad ke 20, Amerika mulai meninggalkan konsep *laissez-faire state* untuk menuju pada penyediaan, minimal beberapa standar tentang jaminan sosial (Hoiberg, 2001).

Munculnya negara kesejahteraan merupakan perubahan lebih lanjut dari negara kemakmuran. Sehingga di sini perlu ada penegasan bahwa ada perbedaan antara negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berusaha mengimplementasikan pemerataan dan keadilan ekonomi dengan Negara kemakmuran (*wealthy state*) yang hanya berorientasi pada terwujudnya kemakmuran namun belum tentu adil dan merata.

Menurut Speake (1999: 69) ide-ide tentang hak ekonomi rakyat tumbuh dan berkembang sejajar dengan tumbuh berkembangnya hal asasi manusia. *Kristalisasi* dar

perlunya jaminan hak asasi bagi warga negara itu kemudian terwujud dalam munculnya *The Bill Of Rights* di Inggris.

Perkembangan hak ekonomi rakyat (jaminan sosial) dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat saling dipisahkan. Hal itu sangat wajar mengingat jaminan ekonomi sosial adalah bagian dari hak-hak ekonomi. Sementara hak-hak ekonomi adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Kesadaran akan perlunya pemberian hak-hak rakyat atau pengakuan terhadap hak asasi manusia baru muncul di belakang nanti.

Kondisi Inflasi Ekonomi

Secara *historis*, inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan di samping masalah pengangguran yang sudah sejak lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Sejarah menunjukkan bahwa salah satu negara yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat adalah Mesir di sekitar tahun 330 SM. <http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi-moderat/> - [ftn1](#) Menurut Samuelson persoalan inflasi adalah setua usia perekonomian pasar.

Inflasi merupakan sebuah fenomena ekonomi yang banyak

mendapat perhatian, sekaligus ditakuti dan dianggap sebagai musuh nomor satu oleh banyak kalangan, mulai dari ekonom, pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat awam sekalipun. Tentunya hal ini disebabkan dampak dari inflasi yang sangat merugikan <http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi-moderat/> - [ftn2](#)

Sejak tahun 1998, gelombang surutnya ekonomi dimulai. Indikasinya dapat dilihat revisi tentang perkiraan satuan-satuan ekonomi *makro* yakni inflasi sampai pada angka 47% (Gie, 2001: 47). Pertumbuhan ekonomi tidak lagi nol persen, tetapi minus 5%. Nilai rupiah yang realistis tidak lagi Rp 5.000 sampai Rp 8.000, tetapi sudah mencapai Rp 8.500 sampai dengan Rp 15.000.

Anggaran yang tadinya harus surplus 1% dari *produk domestik bruto* direvisi menjadi defisit 3% dari *produk domestik bruto*. Bayangkan dengan anggaran pemerintah yang ekspansif, yang diperkirakan ialah inflasi tinggi dan stagnasi. *Stagnasi in optima* yang akan kita hadapi. Angka pengangguran belum dapat diperkirakan, yang pasti akan besar.

Profesor Steve Hanke, guru besar ekonomi Universitas Johns

Hopkins, AS, menyatakan, Indonesia belum siap menghadapi krisis ekonomi. Pernyataan itu tentu membuat otoritas ekonomi Indonesia tidak senang. Apalagi dikatakan, *ekspektasi* inflasi dalam APBN tidak realistis mengingat berbagai kenaikan harga komoditas masih terus berlangsung.

Apalagi mengingat, Indonesia sudah melewati satu dekade krisis ekonomi, hingga kini janggankan kebangkitan ekonomi, menghadapi ancaman krisis ekonomi global saja tampaknya tidak siap. Meski data-data makro membaik, kehidupan masyarakat kian berat. Makanan tradisional yang merupakan makanan rakyat pun kini mahal harganya, menjadi barang "mewah", tidak lagi terjangkau rakyat miskin negeri ini. Semakin beratnya hidup masyarakat *terefleksi* dari hasil berbagai jejak pendapat yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat pada kinerja ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun.

Menurut para ahli ekonomi dampak inflasi sangatlah merugikan bagi setiap kalangan, terutama adalah bagi masyarakat yang berpendapatan tetap seperti halnya para pensiunan, pegawai kecil, dan guru. <http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi->

moderat/ - ftn17 Para ekonom ekonomi konvensional secara umum membagi inflasi berdasarkan tingkat besarnya keparahan (daya rusak) menjadi empat jenis yaitu, inflasi ringan (*creeping inflation*/dibawah 10%), inflasi sedang atau menengah (*galloping inflation*/ antara 10-30%), inflasi tinggi atau berat (*high inflation*/30- 100%), dan inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*/ di atas 100%)

Dampak inflasi itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: dampak dari segi ekonomi dan dampak dari segi sosial. Berikut di bawah ini adalah dampak-dampak inflasi menurut para ekonom.

Pertama, Dari sudut ekonomi, inflasi mengakibatkan terjadinya redistribusi pendapatan dan distorsi harga, distorsi penggunaan uang, serta distorsi pajak. Kedua, Dari sudut sosial, akibat lanjut dari redistribusi pendapatan adalah kecemburuan sosial yang semakin tinggi dan bahkan dapat memicu kerusuhan atau krisis sosial (penjarahan dan perampasan).

Salah satu isu yang paling hangat dalam mengantisi dampak inflasi yakni dengan mengaktifkan kembali gairah dunia perbankan. Niat pemerintah untuk mendirikan bank pembangunan (*development*

bank) dan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi Perbankan, merupakan usaha awal yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan gairah dunia perbankan maka dimulai dari bank sentral.

Bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari target inflasi. Konsep target inflasi ini merupakan produk dari *evolusi teori moneter* dan akumulasi pengalaman *empiris*. Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain:

Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat harga umum (inflasi). Dengan kata lain bahwa pembenahan sektor ekonomi dapat

dilakukan dengan cara pengendalian inflasi.

Salah satu penganut teori klasik modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan *rule* lebih baik dibanding *discretion*. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas *rule vs discretion*, target inflasi menawarkan suatu *framework* yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan *constrained discretion*. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni *rules* ataupun murni *discretion*.

Kebijakan Moneter

Ada berbagai kebijakan yang biasa dipergunakan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Target inflasi merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan target inflasi lebih berorientasi ke depan (*forward looking*) dibanding kebijakan-kebijakan moneter

sebelumnya (yang oleh BI disebut juga kebijakan konvensional). Kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam target inflasi dipergunakan proyeksi inflasi. Walaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target inflasi (*inflation targeting*) ini diharapkan dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang kuat. Tulisan ini mencoba memberi gambaran tentang pembahasan berbagai hal yang berkaitan dengan target inflasi, yang meliputi pengertian, evolusi teori, prasyarat, karakteristik dan elemen target inflasi. Agar dapat mengetahui dengan jelas kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka dalam

pembahasan juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.

Banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi inflasi, namun tak kunjung ada tanda penyelesaian. Seolah-olah menggambarkan inflasi bagaikan "makhluk hidup" yang mempunyai mekanisme pertahanan sendiri dari serangan makhluk hidup lainnya sehingga tidak bisa dimusnahkan. Namun ini tentunya mustahil karena inflasi sendiri hanyalah sebuah fenomena, bukan makhluk hidup. Berbagai kajian dan teoripun telah banyak dihasilkan oleh para ekonom sebagai solusi dari persoalan inflasi. Dalam hal ini, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Teori kuantitas atau persamaan pertukaran dari Irving Fisher $MV=PQ$. Teori ini sejatinya merupakan pandangan dari teori klasik. <http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi-moderat/-ftn6> Menurut persamaan ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga: sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif),

terlalu banyaknya uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.

Kedua, *Teori Keynes* yang menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri (mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak, dan kebijakan uang).

Ketiga, [http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi-moderat/ - ftn7](http://jurnal-ekonomi.org/2008/10/31/membongkar-kerusakan-teori-inflasi-moderat/-ftn7) *Teori strukturalis* atau teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya kekuatan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan

bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa *contractionary monetary policy* dan *vice versa*. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa *open market operation* memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Dalam mengatur/ menggunakan instrumen, kebijakan target inflasi ini lebih berwawasan ke depan. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, yaitu: Pertama, dalam kebijakan ini target dan indikator inflasi ditentukan terlebih dahulu dan dipergunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Kedua, dalam kebijakan ini juga dibuat prediksi inflasi di masa yang akan datang. Prediksi dilakukan dengan mempergunakan data besaran moneter, tingkat bunga, kurs, harga aset, harga barang industri dan sebagainya. Ketiga, melakukan *review* terhadap kinerja kebijakan moneter. Hasil tinjauan tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja selanjutnya.

Sasaran utama dalam kebijakan target inflasi adalah pengendalian inflasi. Kalau ada sasaran-sasaran lain di samping sasaran ini, maka sasaran yang lain harus tunduk pada sasaran utama. Mestinya, publik perlu untuk mengetahui sasaran kebijakan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil yang telah dicapai oleh kebijakan ini harus dimonitor, dilaporkan dan diumumkan secara periodik. Ini penting bagi publik agar dapat mengukur keberhasilan

kebijakan ini, karena akan berpengaruh terhadap ekspektasi masyarakat.

Meski kebijakan target inflasi ini cukup menjanjikan, namun sebenarnya terdapat banyak hambatan yang berkaitan dengan banyaknya prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Ditambah dengan adanya faktor lain yang juga menjadi kendala dalam pemberlakuan kebijakan ini. Secara singkat, hambatan-hambatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhir-akhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa negara kita tidak cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputar politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat.

Kedua, Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik kolusi yang menyebabkan sikap masyarakat semakin apatis dan enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat, kecuali apabila lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa aparaturnya negara bersih dan bebas korupsi.

Ketiga, Menjalankan kebijakan secara *fleksibel* sekaligus kredibel juga bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan *incredible*. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat *inflexible*.

Kesimpulan

Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk akibat krisis memerlukan upaya pemulihan dengan menggunakan kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan berupa *inflation targeting* yang telah berhasil mengentaskan problem inflasi di berbagai negara di dunia. Target inflasi dicetuskan dari perkembangan evolusi teori-teori ekonomi dan dalam pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi suatu negara dengan prasyarat-prasyarat untuk keberhasilan sistem ini.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang secara efektif dapat memulihkan stabilisasi ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan, dengan ongkos yang minimal. Pemulihan kondisi ekonomi yang stabil bukan hanya ditentukan oleh faktor internal, namun juga faktor eksternal, misalnya kondisi politik dan keamanan negara.

Daftar Pustaka

Gie, Kwiek Kian, 2001, *Perkiraan Ekonomi Baru*, Penerbit Kompas. Jakarta

Hoiberg, Dale, 2001, *Encyclopaedia Britannica*.

Speake, Jennifer, 1999, *The Hutchinson Dictionary Of World-History*, Helicon Publishing Oxford.

Sudarman, Suzie, 2001, *Demokratisasi Dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa: Debat Publik Seputar Reformasi Kehidupan Berbangsa: Krisis Kita Dan Demokrasi Dalam Kajian Hubungan Internasional*. Penerbit Kompas. Jakarta.